

BALUTAN KONFUSIANISME DALAM MANUEVER GEOSTRATEGI TIONGKOK DI KEPULAUAN SOLOMON MELALUI *BELT AND ROAD INITIATIVE* PADA TAHUN 2019-2022

*THE CONFUCIAN CLOAK IN CHINA'S GEOSTRATEGY MANEUVERS IN THE
SOLOMON ISLAND THROUGH THE "BELT AND ROAD INITIATIVE" DURING 2019-
2022*

Almasiva Tirta Maedy^{1*}, Wishnu Mahendra Wiswayana²

Universitas Brawijaya, Indonesia

*Email Correspondence: tirtameidyalmasiva@gmail.com

Abstract

This article investigates China's geostrategy in the Solomon Islands using a Relational Theory approach developed by Yaqing Qin, which is heavily inspired by Confucian community values. Unlike Western-dominated theory and approaches to geostrategy, China pursues its geostrategy by widening the circle of interactions and deepening their intimacy with other countries across the world. Therefore, relational strength becomes the primary means of China's power projection, as expressed in an inclusive and equitable economic and development strategy. This article focuses on the critical role of China's Belt and Road Initiative (BRI) as a flexible and inclusive geostrategic instrument, emphasizing mutual respect and goal alignment with the Solomon Islands. As a result, the Solomon Islands government believes that formal collaboration with China will improve national legitimacy and sovereignty. Through this relational approach, China has successfully formed an alternative international governance that is based on long-term relationships and mutually beneficial interests rather than domination and expansionist approaches to broadening its geostrategy in other countries or region.

Keywords: Belt and Road Initiative, China's Geostrategy, Confucianism, Relational Theory, Solomon Island.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji geostrategi Tiongkok di Kepulauan Solomon melalui pendekatan *Relational Theory* yang banyak didasarkan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme. Berbeda dari teori dan pendekatan geostrategi yang telah didominasi oleh Barat, Tiongkok menjalankan geostrateginya untuk dapat memperluas lingkaran relasi serta tingkat keintiman dari relasi yang terjalin. Oleh karenanya, kekuatan relasi menjadi instrumen utama proyeksi kekuatan Tiongkok, tercermin dari pendekatan ekonomi dan pembangunan yang berbasis inklusifitas dan kesetaraan. Tulisan ini akan secara spesifik mengkaji peran krusial *Belt and Road Initiative* (BRI) sebagai instrumen geostrategi Tiongkok yang fleksibel dan inklusif dimana menekankan pada prinsip saling menghormati dan keselarasan tujuan dengan kepulauan Solomon. Hasilnya adalah kepercayaan Pemerintah Kepulauan Solomon untuk membangun kerjasama formal dengan Tiongkok, sekaligus mampu memperkuat legitimasi dan kemandirian nasional. Melalui pendekatan relasional, Tiongkok berhasil membentuk alternatif dalam tata kelola internasional yang tidak mengandalkan pendekatan dominatif dan ekspansionis, melainkan keberlanjutan relasi dan harmoni kepentingan.

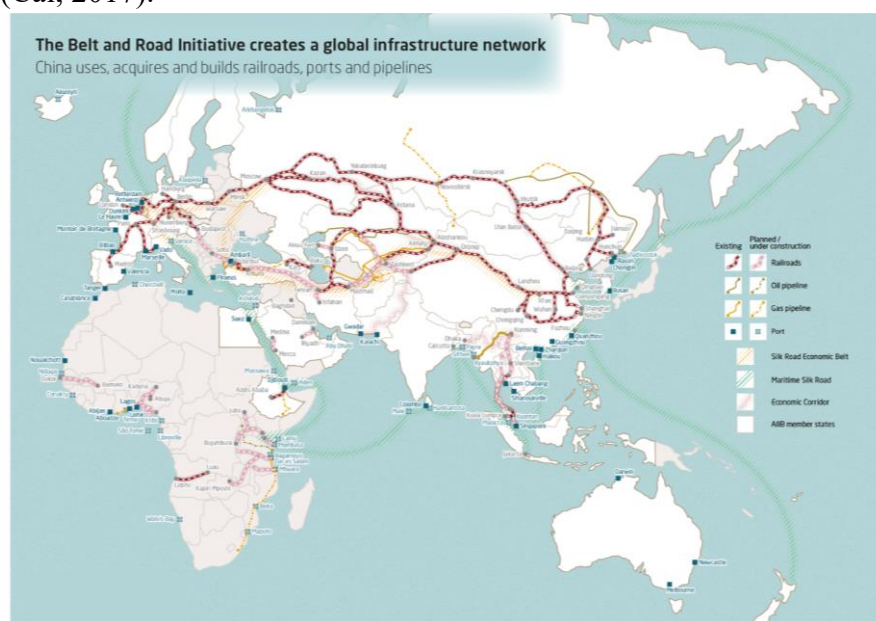
Kata Kunci: *Belt and Road Initiative, Geostrategi Tiongkok, Konfusianisme, Teori Relasional, Kepulauan Solomon.*

PENDAHULUAN

Kebangkitan ekonomi Tiongkok mendorongnya menjadi kekuatan baru bahkan aktor penting dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Kebijakan “Jalur Sutra Baru” atau yang diperkenalkan sebagai *One Belt and One Road* oleh Tiongkok pada 2013 menunjukkan intensinya untuk menjadi kekuatan global. Kini ambisi besar tersebut dikenal

sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI) yang merupakan proyek pengembangan infrastruktur global Tiongkok dengan investasi yang mencapai lebih dari satu triliun dolar AS (Penelope & Lea, 2017). Tidak hanya itu, BRI juga dipahami sebagai strategi Tiongkok untuk dapat memperluas jaringan ekonominya di seluruh dunia. Sejak pertama kali diperkenalkan dan direalisasikan, program ini berhasil memperluas jaringan perdagangan Tiongkok, dimana pada tahun 2018 saja lebih dari 100 negara dan organisasi internasional telah bergabung dan menandatangani kerjasama BRI. Inisiatif ini berhasil memperluas pengaruh dan jaringan Tiongkok tidak hanya di kawasan Asia, namun hingga Benua Eurasia, Afrika, Amerika Latin, Karibia bahkan Kepulauan Pasifik (China Insight, 2018). Hal ini dipertegas dengan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Tiongkok, bahkan menjadi salah satu inisiatif global utama Xi Jinping dan diabadikan dalam Konstitusi Tiongkok (Yamei, 2017).

BRI dibagi menjadi dua komponen utama, yakni *the Silk Road Economic* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. *The Silk Road Economic* merupakan jalur darat yang menghubungkan wilayah daratan di bagian barat Tiongkok dengan Eropa melalui Asia, sementara *21st Century Maritime Silk Road* merupakan rute maritim yang menghubungkan wilayah pesisir Tiongkok dengan Asia tenggara hingga Afrika melalui jalur kereta api dan pelabuhan (Cai, 2017).



Gambar 1. Peta *Belt and Road Initiative*
Sumber: Mercator Institute for China Studies, 2018

Peta tersebut menunjukkan bahwa BRI tidak hanya terbatas pada Benua Asia, namun Tiongkok juga memperluas pengaruh ekonomi dan militernya jauh keluar dari kawasan hingga ke Kepulauan Pasifik, pelosok Afrika bahkan Eropa. Tak berhenti sampai disitu, ambisi besarnya untuk menjadi kekuatan global nampak dari konsep *Island Chain* yang digunakan dalam strategi keamanan kontemporer dari Tiongkok. Konsep *Island Chain* sendiri merupakan konsep keamanan geografis yang digunakan untuk menggambarkan perimeter pertahanan atau serangan dengan menghubungkan pulau dan daratan lain secara

bersama (Erickson & Wuthnow, 2016). Perencana angkatan laut Tiongkok berharap untuk dapat mencegah musuh beroperasi pada *first island chain*, memperebutkan kendali pada *second island chain* dan beroperasi sebagai angkatan laut militer pada *third island chain* (VornDICK, 2018). Menariknya, konsep ini baru digunakan oleh dua negara di dunia dalam strategi pertahanannya, yakni digagas oleh *Department of Defence* Amerika Serikat kemudian diadopsi oleh Tiongkok ke dalam strategi pertahanannya sebagai proyeksi kekuatan di luar kawasan. Analisis Barat mulai mendeteksi perspektif *Sino-centric* dalam wacana resmi Tiongkok yang menjadi salah satu ambisi besar dari Laksamana Liu Huaqing (Komandan PLAN) pada akhir 1980 hingga awal 1990-an. *First Island Chain* yang Tiongkok klaim meliputi Jepang, Kepulauan Ryukyu dan Filipina (You & You, 1991). Sementara pada tahun-tahun selanjutnya Bernard Cole menegaskan bahwa *first island chain* Tiongkok meluas ke selatan hingga ke Kalimantan dan Natuna di Indonesia (Cole, 2001). *Second Island Chain* meliputi Kepulauan Mariana, Guam, Palau, serta negara-negara Pasifik Selatan seperti Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Palau dan lainnya (Erickson & Wuthnow, 2016). Sementara *Third Island Chain* mengarah jauh ke arah timur, mendekati Hawaii.



Gambar 2. Konsep *Island Chain* Tiongkok

Sumber: Vorndick, 2018

Beberapa sumber menganggap bahwa *first island chain* bagi Tiongkok merupakan masalah yang strategis sebab daerah pesisirnya dikepung oleh negara-negara yang lebih condong kepada Amerika Serikat, sebaliknya banyak bertolak belakang dengan Tiongkok. Oleh karenanya, geostrategi Tiongkok tidak bisa hanya terbatas pada *first island chain*, namun harus menerobos dan melampauinya hingga ke *second* dan *third island chain*. Tiongkok menempatkan Kepulauan Pasifik sebagai *Second island chain* dari proyeksi geostrateginya. Melihat hal ini, Posisi Kepulauan Pasifik sebagai *second island chain* bagi

Tiongkok sekaligus Jalur Sutra Maritim pada BRI menunjukkan bahwa kawasan ini menjadi wilayah strategis bagi Tiongkok, padahal kawasan ini berada cukup jauh dari batas wilayahnya. Kedua strategi yang dilakukan Tiongkok melalui BRI dan konsep *Island Chain* dalam strategi pertahanannya menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki ambisi yang besar untuk memperluas geostrateginya di luar kawasan.

Upaya yang dilakukan Tiongkok untuk memperluas proyeksi kekuatan dan pengaruhnya di kawasan Pasifik diwujudkan dalam bentuk bantuan dan asistensi yang signifikan kepada beberapa negara seperti Tonga, Vanuatu, Fiji dan beberapa negara Kepulauan Pasifik lainnya dalam bentuk kerjasama ekonomi, pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, perdagangan dan investasi hingga bantuan teknologi (Aditya & Paramitha, 2024). Kini Tiongkok tampaknya telah berhasil menembus “benteng” Kepulauan Pasifik yang sebelumnya telah lama menjadi koloni dari negara-negara Barat. Hal ini terlihat dari sejumlah negara Pasifik yang telah menandatangani dan menjadi mitra dari BRI, salah satunya Kepulauan Solomon. Jika ditelisik lebih lanjut, hubungan bilateral antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon memiliki dinamika yang cukup menarik. Hubungan antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon telah diusahakan sejak tahun 1982, ketika Pemerintah Kepulauan Solomon telah mempertimbangkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Pada April 1982, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Ezekiel Alebua mengunjungi Tiongkok untuk membahas lebih lanjut terkait pembukaan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Namun disaat yang bersamaan, Pemerintah Kepulauan Solomon juga mengirimkan delegasi ke Taiwan untuk membuka hubungan diplomatik pula, hal ini tentunya menimbulkan “pertempuran” diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan. “Pertempuran” diplomatik tersebut akhirnya dimenangkan oleh Taiwan, ketika pada 1983 Kepulauan Solomon menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan (Kabutaulaka, 2010). Namun setelah sekian lama menjalin hubungan dengan Taiwan, Kepulauan Solomon dan Tiongkok akhirnya secara resmi membuka hubungan diplomatik pada tahun 10 Oktober 2019 (The State Council of PRC, 2019).

Hubungan diplomatik antara Kepulauan Solomon dengan Tiongkok banyak dipengaruhi oleh terpilihnya Manasseh Sogavare sebagai perdana menteri pada April 2019, yang kemudian membentuk *Democratic Coalition Government for Advancement (DCGA)*. Pada 100 hari pertama, DCGA menyatakan bahwa mereka akan meninjau kembali mitra pembangunannya, termasuk mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik dengan Tiongkok (Solomon Island Broadcasting Corporation, 2019). Pada bulan-bulan berikutnya, Pemerintah Kepulauan Solomon mengeluarkan kebijakan untuk mengubah arah hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok, termasuk membuat Satuan Tugas bipartisan yang bertugas untuk mengkaji dampak positif dan negatif untuk mengubah arah kebijakan luar negeri dan mitra pembangunannya ke Tiongkok (Solomon Island Government). Sebelumnya Tiongkok memang telah menjadi mitra perdagangan terbesar bagi Kepulauan Solomon sejak tahun 2011. Selama 2011 hingga 2020, Ekspor dari Kepulauan Solomon ke Tiongkok mencapai 58,47% dari total perdagangan internasional yang dilakukan (Eudeline & Hung, 2022). Sehingga hal ini menjadi alasan rasional bagi Kepulauan Solomon untuk membuka

hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hubungan antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon akhirnya semakin erat ketika Solomon meratifikasi BRI pada tahun 2019.

Tak berhenti pada kerjasama ekonomi, Tiongkok juga mengembangkan kerjasama keamanan dengan Kepulauan Solomon. Relasi antara keduanya berhasil menghasilkan perjanjian keamanan (*security agreement*) pada tahun 2022. Dimana merupakan langkah awal Tiongkok untuk mendapatkan ruang strategis di Pasifik. Selain menandatangani perjanjian keamanan, keduanya juga membuat usulan “visi pembangunan bersama” pada pertengahan tahun 2022. Usulan tersebut berupaya untuk menyelaraskan dan mengintensifkan kerjasama ekonomi, politik dan keamanan Tiongkok dengan negara-negara di Pasifik melalui inisiatif multilateral (Anna Powles, 2022). Terdapat dokumen Rancangan Ringkasan Eksekutif Tetap yang bocor pada tanggal 31 Maret 2022 yang menunjukkan bahwa Tiongkok akan menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon (Conolly, 2024). Perjanjian keamanan tersebut tentunya memicu kecemasan dan respon yang cukup keras dari Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Sebab perjanjian keamanan tersebut menghasilkan konsekuensi yang mampu memperluas ruang gerak militer Tiongkok di Solomon, bahkan Kepulauan Pasifik. Hasil dari perjanjian keamanan tersebut adalah pengerahan personel keamanan Tiongkok ke Kepulauan Solomon pada Desember 2022 (Fraenkel & Smith).

Upaya Tiongkok untuk memperluas geostrateginya hingga ke seluruh penjuru dunia (baik melalui konsep *island chain* maupun BRI) merupakan poin yang sangat menarik untuk dibahas. Menurut Grygiel, ketika perbatasan negara tidak stabil, maka negara harus memfokuskan upayanya pada pelestarian keamanan teritorial, sehingga tidak dapat menjalankan geostrategi yang efektif, jauh dari wilayahnya (Grygiel, 2007). Hal ini juga sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh Venesia dan Tiongkok pada zaman Dinasti Ming ketika ketidakstabilan di perbatasan darat menghambat upaya untuk memproyeksikan kekuatan masing-masing ke Mediterania Timur dan Laut Cina Selatan (Grygiel, 2007). Faktanya, hingga saat ini kondisi perbatasan Tiongkok masih tidak stabil. Hubungannya dengan Taiwan dan Amerika Serikat dibalikannya, ideologi yang sangat bertolak belakang dengan Jepang dan Korea Selatan bahkan hingga konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Namun fakta tersebut tidak menghentikan upaya Tiongkok untuk memperluas geostrateginya ke luar kawasan (dalam tulisan ini hingga ke Kepulauan Solomon). Variabel stabilitas perbatasan yang diajukan Grygiel sebagai salah satu aspek berhasilnya upaya geostrategi suatu negara nyatanya bukan menjadi penghalang bagi Tiongkok.

Penelitian ini menggunakan *Relational Theory* oleh Yaqing Qin, seorang ahli dan pengamat Hubungan Internasional yang berasal dari Tiongkok. Melalui logika relasionalitas, Qin berusaha menjelaskan bahwa dunia terdiri dari “hubungan” dan proses yang mengiringinya. Menurut *Relational Theory*, kerjasama merupakan sebuah proses yang dihasilkan dari pemeliharaan, pengelolaan dan harmonisasi hubungan antar aktor internasional (Qin, 2016). Dengan kata lain, aktor akan cenderung membuat keputusan sesuai dengan tingkat keintiman atau pentingnya hubungan yang terjalin dengan aktor lainnya. Oleh karenanya, geostrategi yang dijalankan Tiongkok pada masa kontemporer

tidak hanya didasarkan pada aspek keamanan yang seringkali dibatasi dengan fakta instabilitas perbatasan, namun “hubungan” yang perlu dibangun dalam dunia hubungan internasional menjadi unit analisis utama. Teori ini banyak didasarkan pada epistemologi konfusianisme yang banyak mendasarkan unit analisisnya pada hubungan. Hal ini sesuai dengan analogi *hanzi* atau karakter tulisan Cina yang sangat bergantung pada bagaimana karakter tersebut terkait dengan karakter lain dalam sebuah kalimat. Tanpa adanya hubungan dengan karakter lain, satu karakter saja dapat memiliki banyak arti dan makna.

Studi ini berusaha untuk menjembatani kesenjangan yang sangat signifikan antara konsep geostrategi “ala Barat” yang seringkali didasarkan pada rasionalitas, namun dengan *Relational Theory* Yuqin Qin mengevaluasi geostrategi Tiongkok dengan fokus pada relasionalitas yang ingin dibangun. Meski kini Tiongkok telah menjadi negara *super power*, namun secara rasional, instabilitas kawasan sangat tidak memungkinkannya untuk mewujudkan proyeksi kekuatan jauh dari luar kawasan. *Relational Theory* mampu digunakan untuk mengidentifikasi perilaku negara dalam menjalin hubungan antar aktor bahkan memproyeksikan geostrateginya terhadap kawasan atau negara tertentu dalam hubungan internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan ini menggunakan teori relasional yang dikembangkan oleh Yaqing Qin, seorang ahli dan pengamat hubungan internasional asal Tiongkok. Teori relasional menggambarkan dunia hubungan internasional yang berbeda, yakni dunia yang tidak terdiri dari aktor-aktor mandiri dan “sudah terbentuk” masing-masing, namun identitas dan peran aktor dibentuk oleh hubungan sosial yang saling terkait satu sama lain (Qin, 2016). Oleh karenanya, Yaqing Qin berusaha untuk memberikan perspektif baru yang menjelaskan bahwa memahami dan mendalami perilaku aktor dalam dinamika hubungan internasional tidak dapat selalu dijelaskan dengan pendekatan yang rasional melalui faktor material yang dimiliki seperti *power* dan kepentingan (meski kedua hal ini sangatlah penting). Namun menurut Qin terdapat faktor lainnya, yakni aspek non material (*budaya, ide, history*) yang membuat aktor dan negara saling berinteraksi.

Qin menyebut bahwa teori relasional merupakan padanan dari pemikiran rasional barat dalam komunitas budaya konfusianisme (Qin, 2016). Sehingga teori relasional banyak didasarkan pada karakteristik dan latar belakang pengetahuan yang terbentuk dalam sejarah dan praktik masyarakat Konfusian. Menurut Fei, seorang Sosiolog Tiongkok berpendapat akan perbedaan antara dunia Barat dan cara berpikir masyarakat konfusian. Fei menganalogikan bahwa Dunia Barat menganggap dunia sosial layaknya tumpukan batang padi di ladang, tidak saling bergantung dan berdiri sendiri (Fei, 2005). Sementara Orang Tiongkok memandang dunia sosial sebagai riak-riak di danau yang akan merambat dan saling terhubung satu sama lain dan membentuk lingkaran konsentris (Fei, 2005). Bagi orang Tiongkok, peristiwa saling terkait, manusia saling terhubung bukan sebagai “potongan kue”

namun sebagai “tali dalam jaring”, sehingga menjadikan dunia sebagai suatu yang rumit (Nisbet, 2010).

Tulisan ini menempatkan teori relasional dengan konsep geostrategi dalam satu titik untuk dapat menjelaskan “motivasi” Tiongkok memproyeksikan kekuatannya jauh dari kawasan (secara spesifik Kepulauan Solomon), meski kondisi geopolitik di sekitarnya cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keterkaitan antara keduanya berfungsi untuk memahami dan menjelaskan geostrategi Tiongkok terhadap Kepulauan Solomon sebagai suatu aktivitas yang memiliki latar belakang dan dasar yang kuat. Dalam hal ini, pembaca diberikan pemahaman mengenai geostrategi Tiongkok yang tidak hanya semata-mata didasarkan pada rasionalitas dan orientasi politik yang mengiringinya, namun geostrategi tersebut dilakukan dengan berorientasi pada relasi.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji geostrategi yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Solomon (2019-2022) yang notabene sangat jauh dari kawasan dan sekilas tidak terlalu menjanjikan untuk memproyeksikan kekuatannya di negara tersebut. Metode kualitatif dipilih sebab berfokus pada pengumpulan data yang berupa kata-kata dan gambar, alih-alih data numerik (Moleong & Surjaman, 2014). Selain itu, metode kualitatif berfungsi untuk mengumpulkan data yang cenderung tidak terstruktur, yang biasanya berbasis wawancara, pengamatan dan analisis studi kasus dan kelompok-kelompok fokus lainnya (Lamont & Boduszynski). Sementara itu, pendekatan deskriptif mampu memberikan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai geostrategi Tiongkok yang proyeksikan di Kepulauan Solomon, sehingga mampu menawarkan analisis yang mendalam mengenai implementasi geostrategi yang dilakukan Tiongkok jauh di luar kawasannya menggunakan logika atau perspektif relasionalitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan teknik kepustakaan atau metode studi pustaka. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis akan mengumpulkan data sekunder, dimana data-data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur terkait, berupa jurnal, buku, dokumen resmi dari kedua negara, yang membahas mengenai geostrategi Tiongkok, hubungannya dengan Kepulauan Solomon serta implementasi kerangka kerja sama *Belt and Road Initiative* dengan Kepulauan Solomon. Selain itu, dokumen luar negeri serta laporan yang mencakup tentang kebijakan luar negeri dari kedua negara khususnya yang membahas mengenai inisiatif BRI, prinsip yang diusung dan implementasi kerjasama dengan Kepulauan Solomon juga digunakan sebagai sumber data. Peneliti juga akan menghimpun dan menyeleksi artikel, publikasi maupun laporan terkait pasang surut hubungan bilateral kedua negara, keuntungan dalam bidang ekonomi yang dirasakan, dampak dari relasi yang terjalin. Data tersebut akan dianalisis lebih lanjut guna menggali informasi lebih dalam mengenai relasi yang terjalin di antara keduanya, apakah *zero sum* ataukah *win-win*.

Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan akan merujuk pada model analisis dari Miles dan Huberman yakni metode analisis dan interaktif. Teknik analisis data yang

dilakukan melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh tersebut (Miles & Huberman). Tahap reduksi data merupakan tahapan yang berfungsi untuk melakukan penyaringan terhadap data-data daring yang telah dihimpun penulis agar data yang dipilih sesuai dan relevan dengan kebutuhan peneliti dalam menjawab rumusan masalah (Miles and Huberman). Sementara itu, tahap penyajian data merupakan penyusunan data yang telah direduksi dan dipilih sebelumnya, dapat berupa gambar, grafik, tabel maupun teks yang bersifat naratif untuk dapat mempermudah pembaca dan mendukung argumen penulis. Tahap verifikasi data dilakukan dengan melakukan komparasi dengan sumber-sumber media daring lainnya yang kredibel, sehingga data yang digunakan merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relations as Instruments of Power: Relasi sebagai Kekuatan dalam Diplomasi dan Proyeksi Geostrategi Tiongkok terhadap Kepulauan Solomon

Menurut Hwang (1987) *relational power* merupakan kemampuan untuk mengubah sikap, motivasi, maupun perilaku aktor lain agar sesuai dengan keinginan seseorang selama proses interaksi sosial (Hwang, 1987). Qin menekankan bahwa lingkaran relasional dapat menjadi keuntungan ketika seorang aktor memiliki lingkaran hubungan yang lebih besar dan prestise. Hal ini sesuai dengan kebudayaan masyarakat Tiongkok yang sering disebut sebagai Mianzi yakni ‘permainan kekuatan’, melalui besarnya lingkaran relasional yang dapat dibangun (Qin, 2016). Artinya, bagi kebudayaan masyarakat Tiongkok, mencari, memelihara dan memperluas lingkaran relasional merupakan modal yang penting dalam membangun citra dan prestise termasuk perluasan geostrategi. Pada interaksi yang terjadi antara negara donor dan penerima bantuan, negara donor mungkin tidak mengharapkan imbalan simetris, sebaliknya hanya mencari modal sosial seperti reputasi, atau penguatan ikatan jangka panjang (Lin, 2001). Hal ini nyata seperti yang dilakukan Tiongkok pada tahun 1960-an ketika memberikan bantuan kepada beberapa negara Afrika meski pada saat itu Tiongkok sendiri masih miskin dan terbelakang. Dalam kasus ini jelas, Tiongkok tidak mengharapkan keuntungan materi yang simetris, namun ingin mendapatkan relasi dan reputasi sebagai “teman dan solidaritas diantara negara-negara dunia ketiga”. Menariknya, keberhasilan Tiongkok mendapatkan kembali keanggotaannya di PBB pada tahun 1970-an terwujud karena dukungan yang banyak diberikan negara-negara Afrika.

Hubungan Tiongkok dengan Kepulauan Solomon memiliki dinamika sejarah yang sangat menarik, dimana sejak tahun 1983 Kepulauan Solomon telah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan (Kabutaulaka, 2010). Namun akhirnya berpindah haluan ke Tiongkok 10 Oktober 2019, bersamaan dengan penandatanganan kerjasama BRI (The State of Council PRC, 2019). Sehingga selama lebih dari tiga dekade Kepulauan Solomon tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dengan Tiongkok, namun menariknya melalui “instrumen” BRI Tiongkok dapat masuk dan mengalihkan hubungan diplomatik yang semula berkiblat pada Taiwan. Keputusan ini sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan

perdagangan antar kedua negara utamanya pasca Tiongkok berhasil tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Menariknya, keberhasilan geostrategi Tiongkok ke Kepulauan Solomon juga banyak dipengaruhi oleh gelombang baru migran dari Tiongkok yang mendominasi sektor ritel di Honiara dan provinsi lainnya di Kepulauan Solomon. Kedua faktor ini berhasil membuat Tiongkok “masuk” secara mulus ke dalam dinamika internal di Kepulauan Solomon hingga akhirnya berhasil menciptakan interaksi bahkan relasi yang saling menguntungkan dan memproyeksikan kekuatannya di negara ini.

Peralihan navigasi diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok dan berhasilnya geostrategi di Kepulauan Solomon tidak terlepas dari andil diaspora Tiongkok yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional Kepulauan Solomon. Diaspora Tiongkok di Kepulauan Solomon telah bermigrasi sejak tahun 1800-an akhir namun meningkat secara signifikan pada 1930-an ketika seorang Komisaris Tinggi baru yang sebelumnya bekerja di Hong Kong menjabat dan memiliki pandangan yang baik terhadap orang Tionghoa (Solomon Encyclopedia, n.d.). Pasca PD I dan PD II, masyarakat Tionghoa berhasil menguasai sebagian besar perdagangan ritel di Protektorat serta menjadi sangat dominan di Honiara dan ibu kota provinsi lainnya (Solomon Encyclopedia, n.d.). Penyebaran kebudayaan Tionghoa semakin masif setelah Sekolah Tionghoa Chung Wah terdaftar pada 15 Oktober 1949. Selanjutnya ribuan diaspora Tiongkok tinggal di Kepulauan Solomon yang secara substansial mendukung perekonomian pulau tersebut dengan toko-toko dan bisnis di pusat kota.

Provinsi-provinsi utama seperti Guadalcanal, Malaita, dan Honiara tidak mampu menahan migrasi warga Tionghoa yang telah mendirikan toko ritel dan mendominasi sektor ritel, sehingga berhasil mengintegrasikan bisnis milik etnis Tionghoa dan masyarakat Kepulauan Solomon (Smith, 2012). Fenomena ini membuat Pemerintah Tiongkok, khususnya Pemerintah Provinsi Guangdong (sebagian besar migran berasal dari provinsi ini) terus melakukan interaksi meski belum ada hubungan diplomatik formal yang terjalin. Puncaknya pada April tahun 2006 ketika terjadi kerusuhan di *China Town* (Pecinan) Honiara merenggut beberapa korban beretnis Tionghoa hingga mengundang beberapa petugas dari Kantor Guangdong untuk datang ke Kepulauan Solomon (sebab mayoritas imigran Tiongkok datang dari Guangdong). Oleh karenanya meski belum ada hubungan diplomatik formal yang terjalin, diaspora Tiongkok di Kepulauan Solomon telah lebih dahulu membuka, membangun dan memelihara relasi dengan masyarakat lokal.

Selain itu, Tiongkok telah berhasil masuk dan berpengaruh besar pada arus perdagangan Kepulauan Solomon, bahkan sebelum keduanya membuka hubungan diplomatik formal. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan penting bagi para pemangku kepentingan dan elit pemerintah Kepulauan Solomon. Tiongkok merupakan aktor yang sangat penting dalam urusan ekonomi dan perdagangan internasional bagi Kepulauan Solomon, terlihat ketika 2018 Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Kepulauan Solomon.

Tabel 1. 10 Negara tujuan ekspor terbesar Kepulauan Solomon

Negara	Nilai Ekspor (US \$)
Tiongkok	\$380.4M
Uni Eropa	\$54.3M
India	\$28.9M
Swiss	\$13.9M
Thailand	\$12M
Taiwan	\$11.1M
Filipina	\$10.70M
Malaysia	\$8.8M
Hong Kong	\$8.1M
Inggris	\$6.1M

Sumber: WTO Tariff and Trade Data, 2018

Selain menjadi mitra dagang terbesar pada 2018, jumlah ekspor-impor antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon terus meningkat setiap tahunnya, mencerminkan hubungan dagang yang sangat kuat dan saling bergantung di antara kedua negara.

Tabel 2. Volume Ekspor dan Impor Tiongkok-Kepulauan Solomon

	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
Neraca Perdagangan	\$203,8 12,205	\$183,0 74,313	\$205,92 4,808	\$253,98 0,460	\$290,93 9,455	\$227,54 6,248
Ekspor	\$263,6 11,159	\$232,2 10,661	\$273,31 7,891	\$325,83 0,017	\$380,35 2,736	\$295,06 4,493
Impor	\$59,79 8,954	\$49,13 6,348	\$67,393 ,083	\$71,849 ,557	\$89,413 ,281	\$67,518 ,245

Sumber: UN Comtrade (Data diolah Penulis)

Tabel tersebut menunjukkan besarnya volume perdagangan antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon, dimana secara simultan berhasil menyumbang surplus pada neraca perdagangan dalam jumlah yang cukup besar pula, berbanding terbalik dengan defisit perdagangan yang besar dengan Australia. Meski belum resmi membuka hubungan diplomatik, Tiongkok berhasil masuk dan membangun relasi dengan menjadi mitra dagang serta ekonomi terbesar bagi Kepulauan Solomon. Hal ini tentunya membawa banyak

keuntungan, sehingga dari sudut pandang Kepulauan Solomon menjalin hubungan diplomatik dan mengintensifkan interaksi dengan Tiongkok menjadi keputusan yang sangat menguntungkan.

Setelah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada 10 Oktober 2019, sekaligus menandatangani kerjasama BRI, Tiongkok tetap konsisten bahkan memperbesar jumlah donor bantuan luar negeri terhadap Kepulauan Solomon. Dalam kurun waktu 2019-2021, Tiongkok diestimasikan telah mengalirkan dana bantuan hingga 162 juta USD (Dreher et al., 2017). Beberapa diantaranya meliputi pembangunan Stadion Nasional guna penyelenggaraan *Pacific Games* 2023 sebesar 17,67 juta USD dan *Rural Constituency Development* sebesar 34,25 juta USD (Hanson, 2022; Ministry of Rural Development, 2021). Tiongkok juga berperan aktif dalam menyuplai kebutuhan selama pandemi dengan memberikan dana hibah pada 2020 sebesar 2,8 juta USD disertai peralatan kesehatan dan *technical assistance* untuk meningkatkan kapasitas negara dalam menghadapi pande (Solomon Islands Government, 2020). Pada tahun 2021, Tiongkok menjadi penyuplai vaksin utama bagi Kepulauan Solomon dan bantuan medis lainnya terus dilakukan secara konsisten hingga puncaknya pada 2022 ketika Tiongkok memberikan dana hibah sebesar 350 ribu USD guna mendorong perbaikan ekonomi pasca pandemi (Global Times, 2022).

Prinsip *peaceful development* yang selalu dibawa sejak awal pengenalan program BRI menjadi salah satu kekuatan relasional bagi Tiongkok. Prinsip *peaceful development* dengan mengalirkan bantuan luar negeri yang sangat masif ke Kepulauan Solomon namun tetap menjaga kepentingan, ideologi dan identitas masing-masing negara menjadi salah satu faktor penting yang membuat Kepulauan Solomon mengalihkan navigasi diplomasinya dari Taiwan ke Tiongkok dan secara simultan berhasil memproyeksikan geostrateginya tidak hanya di Kepulauan Solomon, namun berbagai negara di dunia lainnya.

Governing the Inclusive Relation: Strategi Tiongkok dalam Membangun Tata Kelola yang inklusif yang Berbasis Relasi Setara dengan Kepulauan Solomon

Tata kelola relasional merupakan proses negosiasi yang mengatur hubungan kompleks dalam suatu lingkaran relasi untuk menghasilkan ketertiban sehingga para anggota dapat berperilaku secara kooperatif dan timbal balik. Menurut Qin, kepercayaan dan pemahaman bersama tentang norma-norma sosial serta moralitas manusia menjadi salah satu dasar yang penting untuk mewujudkan tata kelola relasional (Qin, 2010). Selain itu, *relational governance* juga mengisyaratkan tentang kemampuan negara dalam membangun relasi yang kooperatif dan tertata dalam lingkaran relasional yang telah dibentuknya. Dalam hal ini dapat dilihat ketika Tiongkok berusaha untuk membangun relasi melalui kerjasama yang kooperatif, diplomasi dan tata kelola yang sangat baik.

Melalui pandangan tersebut, Tiongkok mengidentifikasikan dirinya sebagai negara berkembang, dimana secara tersirat juga mampu menjaga harmonisasi utamanya dengan negara-negara berkembang, sehingga eksistensi dan aktivitas Tiongkok di kawasan tidak dianggap sebagai suatu ancaman, berbeda jika mengidentifikasikan dirinya sebagai negara maju. Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen Tiongkok untuk terus mendukung negara

berkembang dalam memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil dengan mengatasi ketidaksetaraan dalam organisasi internasional, dimana seringkali berpihak pada negara maju (Qin, 2010).

Komitmen tersebut terus diperkuat terutama setelah Presiden Xi mengumumkan kerangka kerjasama *Belt and Road Initiative* pada 2013 silam. BRI dibangun atas dasar saling menghormati, dengan prinsip konsultasi ekstensif, kontribusi bersama dan manfaat bersama. Prinsip ini menganjurkan kerjasama demi kebaikan dan kepentingan bersama, dimana ditekankan bahwa semua negara merupakan peserta, kontributor dan penerima manfaat yang setara. Tidak peduli pada besar kecilnya, kaya miskinnya atau kuat lemahnya suatu negara, semua pihak dapat berpartisipasi setara dan mengemukakan pendapat dengan bebas dalam kerangka kerjasama BRI (The State Council Information Office of the PRC, 2023). Hal ini tentunya mampu membangun kepercayaan dan tata kelola relasional yang saling kooperatif dan timbal balik.

Sejalan dengan hal tersebut, membangun kerjasama melalui program BRI dengan Kepulauan Solomon, Tiongkok berkomitmen untuk mengejar jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi domestik negara, menjaga kedaulatan, keamanan, kepentingan pembangunan nasional, serta memperdalam kerjasama di berbagai bidang sembari menjaga kepentingan nasional masing-masing negara (Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2024). Hal ini menjadi dasar yang penting untuk membangun tata kelola relasional yang baik. Dalam menyalurkan bantuan ke Kepulauan Solomon, Tiongkok memiliki beberapa prinsip panduan untuk dapat menciptakan tata kelola relasional yang adil dan baik. Pertama, bantuan yang diberikan Tiongkok pada Kepulauan Solomon (dan negara-negara lainnya) selalu didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat, dimana sesuai dengan pepatah Konfusius, seorang filsuf Tiongkok kuno “Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan (Ministry of Public Security of the PRC, 2022). Oleh karenanya, semua proyek bantuan Tiongkok di Kepulauan Solomon selalu dilaksanakan setelah konsultasi penuh dengan otoritas pemerintah Kepulauan Solomon.

Kedua, bantuan Tiongkok didasarkan pada prinsip non-intervensi, sehingga Tiongkok sangat menghormati kedaulatan pemerintah nasional ketika bekerja sama. Tiongkok juga tidak pernah mengekspor nilai-nilainya dan membuat argumen yang mencemarkan nama baik negara penerima, sehingga tata kelola yang tercipta lahir dari kepercayaan dan hubungan saling menghormati (Ministry of Public Security of the PRC, 2022). Ketiga, bantuan Tiongkok bersifat terbuka dan inklusif, misalnya dengan melakukan *joint venturer*, transfer teknologi kepada para pekerja lokal dengan memberikan pelatihan teknis dan keterampilan baru, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan ekonomi di negara penerima, sebagaimana pepatah Tiongkok kuno mengatakan “Lebih penting mengajarkan cara memancing daripada sekadar memberi mereka ikan” (Ministry of Public Security of the PRC, 2022).

Selain itu, Kepulauan Solomon memiliki sejarah yang kelam dengan pihak eksternal, bahkan hingga saat ini sedang mencari “tujuan hidup” dan ingin menjadi lebih mandiri terutama setelah kepergian RAMSI (*Regional Assistance Mission to Solomon Islands*).

Keterlibatan Australia dalam misi ini tidak dianggap sebagai tindakan intervensi melainkan *cooperative intervention*. Namun demikian, peran dan keterlibatan RAMSI dalam urusan domestik Solomon sangatlah besar dan dalam periode waktu yang cukup panjang yakni dimulai pada tahun 2003 hingga tahun 2017. RAMSI memiliki hak untuk menjaga ketertiban sipil bahkan menyita senjata ilegal hingga mengadili pelanggar pidana serta melindungi kementerian utama pemerintah. Dalam bidang ekonomi, RAMSI juga terlibat yakni besar dalam menjaga stabilitas keuangan negara dengan mengamankan pendapatan serta mengendalikan pengeluaran (Put et al., 2018). Selain itu terdapat masih banyak lagi berbagai intervensi yang dilakukan RAMSI terhadap pemerintahan Kepulauan Solomon yang tentunya membuat lembaga negara memiliki level legitimasi yang sangat rendah.

Tata kelola “intervensionis” dan tidak setara yang diterapkan Australia melalui RAMSI membuat pemerintah Kepulauan Solomon cukup trauma dan ingin tumbuh menjadi negara yang lebih mandiri. Sementara itu, Tiongkok hadir dengan menawarkan tata kelola relasional baru dengan prinsip saling menghormati dan non-intervensi. Hal ini tentu membawa kesegaran baru bagi Pemerintah Kepulauan Solomon, sehingga Tiongkok dapat memproyeksikan geostrateginya dengan sangat mulus.

Relational in International System: Geostrategi Tiongkok dengan Membangun Jaringan Internasional melalui BRI dan Keselarasan Visi dengan Kepulauan Solomon

Qin mendefinisikan sistem internasional relasional sebagai sistem yang dibentuk berdasarkan hubungan. Sistem internasional seringkali menunjukkan hubungan dan dinamika yang berbeda-beda bukan karena penyusunnya beda, namun karena aktor memiliki jenis hubungan yang berbeda di antara mereka (Qin, 2016). Artinya aktor akan cenderung membuat keputusan yang sesuai dengan sifat, kepentingan dan tingkat relasi dengan aktor lainnya. Negara akan mengambil tindakan yang berbeda dengan negara lain berdasarkan status hubungan (kawan atau lawan) dan keintiman relasi yang terjalin. Menurut Qin, sistem internasional itu sendiri didefinisikan oleh hubungan dan hubungan yang setara antar negara berdaulat mendefinisikan sistem Westphalia (yang selama ini dijadikan sebagai landasan teoritis bagi konsep *nation-state*).

Sesuai dengan variabel ini, Tiongkok mewujudkannya dengan membangun relasi yang lebih luas yakni terlibat secara aktif dalam sistem internasional. Keterlibatan aktif ini semakin terlihat nyata ketika Presiden Xi Jinping meresmikan inisiatif BRI pada September 2013 yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur global serta mengintegrasikan perdagangan dunia. Hasilnya ratusan negara telah bergabung dalam proyek BRI, bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil merealisasikan proyek-proyek seperti pabrik di Afrika, jalan di Kazakhstan, kilang minyak di Iran, dan pelabuhan di Yunani, BRI mengubah tidak hanya negara penerima tetapi juga perdagangan global (Maudisha, n.d.). Program BRI menjadi inisiatif global utama Presiden Xi Jinping yang diabadikan dalam Konstitusi Tiongkok, sehingga menunjukkan keseriusannya dalam membangun, menjalin dan mengintegrasikan aktor dalam sistem internasional relasional.

Qin berpendapat bahwa Tiongkok memandang sistem internasional sebagai hubungan antar aktor, sehingga hubungan yang setara antar negara merupakan poin yang penting. Oleh karenanya dalam membangun relasi dan memperluas geostrateginya dengan Kepulauan Solomon, Tiongkok perlu memastikan keselarasan tujuan dan kepentingan masing-masing negara agar dapat menghasilkan relasi yang setara (meski memiliki perbedaan kapabilitas ekonomi dan lainnya). Untuk membahas hubungan jangka panjang antar kedua negara, Tiongkok melalui Cai Weiming (Duta besar RRT untuk Kepulauan Solomon) menyoroti pentingnya menciptakan sinergi dan keselarasan antara inisiatif BRI dengan Strategi Pembangunan 2035 Kepulauan Solomon (Jennifer Kusapa, 2023). Melalui hal tersebut, PM Solomon, Manasseh Sogavare mengakui bahwa hubungan yang telah dibangun dengan Tiongkok berhasil memberikan dampak yang positif bagi rakyat Kepulauan Solomon dalam jangka panjang dan menunjukkan bagaimana Tiongkok sangat terbuka dan menjalankan relasi yang setara dengan Kepulauan Solomon.

Lebih lanjut lagi, Tiongkok menunjukkan bahwa inisiatif BRI tidak hanya menciptakan relasi satu arah, dimana negara-negara mitra “hanya tunduk” pada Tiongkok sebagai inisiator, namun juga turut berkontribusi dan menerima manfaat dengan setara. Dalam beberapa kasus misalnya di kawasan Amerika latin, upaya yang dilakukan Tiongkok untuk membangun pengaruhnya dilakukan dengan membangun harapan dan persepsi baik dari negara mitranya sebagai sekutu yang dapat dipercaya seperti memberi bantuan dana dan investasi (Shahna & Isnarti, 2022). Hal ini terlihat ketika selama kunjungannya dengan Xi Jinping, Sogavare juga membahas inisiatif pembangunan global yang juga menjadi bagian Kepulauan Solomon, dimana membahas mengenai penyelarasan Strategi Pembangunan Nasional dengan inisiatif BRI dengan menciptakan sinergi yang lebih besar antara keduanya. Puncaknya ketika Kepulauan Solomon dan Tiongkok sepakat untuk membentuk kerangka kerja pembangunan strategis yang bertujuan untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2023 bagi Kepulauan Solomon di bidang pengentasan kemiskinan, keamanan pangan, pembiayaan pembangunan, industrialisasi, ekonomi digital, kerjasama ekonomi, perdagangan serta keamanan (Solomon Island Government, 2022).

Upaya tersebut menunjukkan bahwa dalam membangun relasi dan memproyeksikan kekuatannya melalui pendanaan pembangunan dalam proyek BRI, Tiongkok benar-benar mengutamakan jalinan relasi yang setara dengan negara-negara mitranya khususnya Kepulauan Solomon sehingga relasi yang tercipta dalam sistem internasional didasarkan pada asas saling menghormati dan timbal balik. Pada era kontemporer Tiongkok dapat dengan sangat mudah menjalin hubungan dan memproyeksikan geostrateginya jauh di luar kawasan, bahkan berhasil mengintegrasikan dua pertiga negara di dunia melalui inisiatif BRI, meski kondisi sekitar negaranya masih sering menghadapi tantangan. Jadi BRI adalah tentang konektivitas bersama dalam tatanan dan sistem internasional. BRI yang semula disebut sebagai *One Belt and One Road* sangat dipengaruhi oleh filosofi Konfusian, dimana “jalan” berarti “*Dao Lu*” sementara “*Daodejing*” mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Tao, Tao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua dan seterusnya” (Wang, 2018) Inilah yang menjadi tujuan utama dibentuknya BRI yakni menghubungkan negara dan aktor

internasional ke dalam “satu jalan” yang saling terkoneksi. Geostrategi yang coba dibangun Tiongkok melalui Teori Relasional melihat tatanan dan sistem internasional sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung. Oleh karena itu, Tiongkok berfokus pada perluasan pengaruhnya dalam kerjasama ekonomi, pembangunan dan investasi persis seperti yang terlihat dalam inisiatif BRI yang berhasil “mendobrak” Kepulauan Solomon dan membuka hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa geostrategi Tiongkok di Kepulauan Solomon tidak semata-mata didorong oleh ambisi kekuasaan atau ekspansi kekuatan secara koersif sebagaimana kerap diasosiasikan dengan pendekatan geostrategi Barat, melainkan dibangun melalui pendekatan relasional yang berpijak pada filosofi Konfusianisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya relasi yang saling menghormati, timbal balik dan setara, sehingga mampu menghasilkan keharmonisan sosial, dan kepercayaan jangka panjang antar negara. Dengan menggunakan *Relational Theory* dari Yaqing Qin, tulisan ini memperlihatkan bahwa Tiongkok mampu memproyeksikan kekuatannya secara halus dan fleksibel melalui jejaring ekonomi, bantuan pembangunan, diplomasi budaya, dan kerja sama keamanan.

Keberhasilan proyeksi geostrategi Tiongkok dengan Kepulauan Solomon juga diperkuat oleh peran signifikan yang terjalin atas relasi diaspora Tiongkok serta konsistensi dan komitmen Tiongkok dalam menerapkan prinsip non-intervensi dalam kerjasamanya dengan Kepulauan Solomon serta mengimplementasikan tata kelola berbasis saling menghormati.

Sejarah Kepulauan Solomon yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang intervensi eksternal, melalui misi RAMSI yang dipimpin oleh Australia, membuat kedatangan Tiongkok dengan prinsip dan komitmen yang terbuka dan non intervensionis lebih menarik karena memberi ruang otonomi yang lebih besar kepada Kepulauan Solomon. Sebelum membuka hubungan diplomatik formal, Tiongkok telah memiliki peran yang sangat krusial terhadap ekonomi dan perdagangan Kepulauan Solomon, dimana pada 2018 menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Kepulauan Solomon serta menyumbang surplus neraca perdagangan dalam jumlah yang besar dan terus meningkat. Puncaknya pada perpindahan arah diplomasi dari Taiwan ke Tiongkok pada 2019 melalui penandatanganan kerjasama BRI menandai keberhasilan manuever geostrategi Tiongkok, yang didorong oleh konsistensi pemberian bantuan luar negeri, hubungan perdagangan yang kuat, keselarasan visi pembangunan jangka panjang antara kedua negara serta keberhasilan Tiongkok dalam membangun relasi yang setara dengan Kepulauan Solomon.

Dengan demikian, geostrategi yang dilancarkan Tiongkok terhadap Kepulauan Solomon mencerminkan bentuk baru dari proyeksi kekuatan global yang berbasis relasional, bukan ekspansionis dan dominatif. Model ini bukan hanya menantang paradigma dan teori geostrategi tradisional ala barat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan besar dapat meluncurkan geostrategi serta membentuk pengaruh global melalui jalur yang lebih kooperatif dan inklusif. Dalam konteks sistem internasional kontemporer, pendekatan ini

memberikan alternatif baru bagi negara-negara berkembang untuk menjalin kerja sama strategis dengan “kekuatan besar” tanpa kehilangan kedaulatan atau identitas nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. F., Amin, K., & Paramitha, D. I. (2024). China's Military Engagement in The Pacific Region: Implications For Australia's Defence and National Security Policy. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 4(2), 63-84.
- Anna Powles (2022, June 10) “Five Things We Learned about China’s Ambitions for the Pacific from the Leaked Deal,” *The Hongkong Post* Five things we learned about China’s ambitions for the Pacific from the leaked deal -
- Cai, P. (2017). *Understanding China’s belt and road initiative*. Lowy Institute For International Policy
- China Insight (2018, August 31) “China Insight”. International Department of the CPC Central Comitee. China Insight <https://www.idcpc.gov.cn/english2023/dzwk/zgkx/202307/P020230717028554589528.pdf>
- Cole, Bernard D. (2001). *The great wall at sea: China’s navy enters the twenty-first century*. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
- Connolly, P. (2024). China’s quest for strategic space in the Pacific Islands - Mapping China’s Strategic space. *Mapping China’s Strategic Space*. The National Bureau of Asian Research. <https://strategicspace.nbr.org/chinas-quest-for-strategic-space-in-the-pacific-islands/>
- Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. M., & Tierney, M. J. (2017). *Aid, China, and Growth: Evidence from a New Global Development Finance Dataset (AidData Working Paper #46)*. Williamsburg, VA: AidData. [WPS46_Aid_China_and_Growth.pdf](https://www.aiddata.org/WPS46_Aid_China_and_Growth.pdf)
- Eudeline, H and Hung, J.M (2022, July) *Influence of The People’s Republic of China in the Pacific Islands*. Institute Thomas More. *Influence of the People’s Republic of China in the Pacific Islands - Institut Thomas More*
- Erickson, A. S., & Wuthnow, J. (2016). Barriers, springboards and benchmarks: China conceptualizes the Pacific “Island Chains”. *The China Quarterly*, 225, 1-22.
- FEI, XIAOTONG (2005) “Chaxu Geju (Differential Mode of Association).” In *Xiangtu Zhongguo (Folk China)*, edited by Fei Xiaotong, 29–40. Beijing: Beijing Press.
- Fraenkel, J., & Smith, G. (2022). The Solomons-China 2022 security deal: extraterritoriality and the perils of militarisation in the Pacific Islands. *Australian Journal of International Affairs*, 76(5), 473-485
- Global Times. (2022, February 18). Chinese PLA transport aircraft arrives in Solomon Islands with anti-epidemic supplies. *Global Times*. <https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252588.shtml>
- Grygiel, J. J. (2007). *Great powers and geopolitical change*. JHU Press.

- Hanson, F. (2022, June 7). Chinese aid to the Pacific: Decreasing, but not disappearing. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/chinese-aid-pacific-decreasing-not-disappearing>
- Hwang, K. K. (1987). Face and favor: The Chinese power game. *American journal of Sociology*, 92(4), 944-974.
- Jennifer Kusapa (2023, December 21). China commits to assisting Solomon Islands. *The Islandsun*. The Island Sun. <https://theislandsun.com.sb/china-commits-to-assisting-solomon-islands/#:~:text=Additionally,%20China%20aims%20to%20promote%20the%20exp%20of,Islands%20to%20contribute%20to%20social%20and%20economic%20development>
- Kabutaulaka, T. (2010). Milking the Dragon in Solomon Islands. In T. Wesley Smith and E.A. Porter (eds), *China in Oceania: Reshaping the Pacific?* New York: Berghahn Books, 136–50.
- Lamont, C., & Boduszynski, M. P. (2020). *Research methods in politics and international relations*.
- LIN,NAN (2001) “Guanxi: A Conceptual Analysis.” In *The Chinese Triangle of Mainland, Taiwan, and Hong Kong: Comparative Institutional Analysis*, edited by Alvin So, Nan Lin, and Dudley Poston, 153–66. Westport, CT: Greenwood.
- Maudisha (n.d.). Belt and Road Initiative dan Implikasinya Terhadap Tata Ekonomi dan Politik Global. Universitas Indonesia. <https://www.ui.ac.id/belt-and-road-initiative-dan-implikasinya-terhadap-tata-ekonomi-dan-politik-global/>
- Merics (2018, June 7) Mapping the Belt and Road initiative: this is where we stand. <https://merics.org/en/tracker/mapping-belt-and-road-initiative-where-we-stand>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Ministry of Foreign Affairs of the PRC. (2024, July 12). Xi Jinping meets with Prime Minister of Solomon Islands Jeremiah Manele. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyxw/202407/t20240719_11456604.html
- Ministry of Public Security of the PRC (2022, January, 6). 中国—所罗门群岛两国共同维护地区和国际安全——访中国公安部副部长孙力华 [China and Solomon Islands joint efforts to maintain regional and international security—Interview with Sun Lihua, Vice Minister of China’s Ministry of Public Security]. <https://www.mps.gov.cn/n2255079/n6865805/n7355748/n7355818/c8309548/content.html>
- Ministry of Rural Development. (2021, November 23). Solomon Islands Ministry of Rural Development clarifies Constituency Development Fund disbursement. Scoop. <https://www.scoop.co.nz/stories/WO2111/S00284/solomon-islands-ministry-of-rural-development-clarifies-constituency-development-fund-disbursement.htm>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.

- Nisbett, R. (2010). *The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently... and*. Simon and Schuster.
- Penelope Marbler & Lea Shan (2017). *Chinese Investments in Infrastructure Worldwide*. Institut De Relations Internationales Et Strategiques (IRIS). <https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/Asia-Focus-36.pdf>
- Putt, J., Dinnen, S., Keen, M., & Batley, J. (2018). *The RAMSI legacy for policing in the Pacific region*. Australia National University.
- Qin, Y. (2010) "International Society as a Process: Institutions, Identities, and China's Peaceful Rise." *The Chinese Journal of International Politics* 3(2): 129–53. Page 133
- Qin, Y. (2016) *A Relational Theory of World Politics*, *International Studies Review*, Volume 18, Issue 1, Pages 33–47 <https://doi.org/10.1093/isr/viv031>
- Shahna, Y., & Isnarti, R. (2022). Pendekatan Diplomasi Energi Tiongkok Terhadap Venezuela. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(2), 184-199.
- Smith, G. (2012). Chinese reactions to anti-Asian riots in the Pacific. *The Journal of Pacific History*, 47(1), 93-109.
- Solomon Island Broadcasting Corporation (2019, January 6). "DCGA launches 100 Days Policy. Sogavare promises" DCGA launches 100 days policy, Sogavare promises - Solomon Islands Broadcasting Corporation (SIBC)
- Solomon Island Encyclopedia (n.d.). *Solomon Islands Encyclopaedia 1893-1978*. Solomon Island Encyclopedia <https://www.solomonencyclopaedia.net/biogs/E000061b.htm>
- Solomon Islands Government (2019). *Report of the Bi-Partisan Task-Force: Review of Solomon Islands Relations with People's Republic of China and Republic of China*. Honiara: Office of the Prime Minister and Cabinet.
- Solomon Islands Government. (2022, July 19). *Solomon Islands and China agreed to establish a strategic. Solomon Islands Government. developmentframework*. <https://solomons.gov.sb/solomon-islands-and-china-agreed-to-establish-a-strategic-development-framework/> <https://solomons.gov.sb/solomon-islands-and-china-agreed-to-establish-a-strategic-development-framework/>
- Solomon Islands Government. (2020, April 17). *PRC hands \$2.5m in cash grant to fight COVID-19*. Solomon Islands Government. <https://solomons.gov.sb/prc-hands-2-5m-in-cash-grant-to-fight-covid-19/>
- The State Council of PRC 郑成琼. (2019, October 10). *Chinese president meets Solomon Islands PM, pledging closer cooperation*. English. Scio, gov. http://english.scio.gov.cn/m/topnews/2019-10/10/content_75286049.htm
- The State Council Information Office of the PRC. (2023, October). *The Belt and Road Initiative: A key pillar of the global community of shared future*. The State Council Information Office of the PRC. <http://www.beltandroadforum.org/english/n101/2023/1010/c124-895.html>
- Toyama, S. (n.d.). *The establishment of diplomatic relations between Solomon Islands and China*. Asia-Pacific Institute for Capacity Building. Japan Association for Promotion

of International Cooperation. <https://www.apic.or.jp/english/articles/article007-eng.html>

United Nations. (n.d.). Trade flow data for Solomon Islands, 2018 [Data set]. UN Comtrade Database.

(<https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=TOTAL&Partners=156&Reporters=90&period=2018&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>)

VornDick, W. (2018, October 22). China's reach has grown; so should the island chains. CSIS. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/chinas-reach-grown-island-chains/>

Wang, Y. (2018). Belt and road initiative: mutual connectivity of the world. *China and the World*, 1(04), 1850023.

World Trade Organization. (2018). Solomon Islands – Trade profile. Retrieved July, 26, 2025, from <https://ttd.wto.org/en/profiles/solomon-islands>

Yamei (2017, October 24). Full text of resolution on amendment to CPC Constitution - Xinhua http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/24/c_136702726.htm)

You, Ji, & You, Xu. (1991). In search of blue water power: The PLA Navy's maritime strategy in the 1990s. *The Pacific Review*, 4.

